



JPP Jurnal Politik dan Pemerintahan

Dahlan A. Rahman

**PROSPEK DAN HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN DAERAH
DI ERA UUPA DALAM PESTA DEMOKRASI DI ACEH**

Bobby Rahman

STANDAR LAYANAN PROGRAM BPJS KESEHATAN

Zulhilmi dan M. Akmal

DINAMIKA PERGOLAKAN KONFLIK ACEH TAHUN 1945 - 1947

Nurfilani dan Teuku Muzaffarsyah

KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRK SUBULUSSALAM TAHUN 2014

Muhammad Ridhwan dan M. Akmal

**FALSAFAH LIBERAL DALAM MENENTUKAN ARAH PEMBANGUNAN SUATU
BANGSA (Kajian Islam dan Liberalisme di Indonesia)**

Asriatun

**PEREMPUAN DALAM KEKUASAAN KAPITALISME : Kritik Terhadap
Feminisme Liberal di Indonesia**



universitas
MALIKUSSALEH

JPP Jurnal Politik dan Pemerintahan

- Penasehat : Prof. Dr. Apridar, SE., M.Si (Rektor Universitas Malikussaleh)
Penanggung Jawab : M. Akmal, S.Sos., MA (Dekan FISIP Universitas Malikussaleh)
Ketua Dewan Redaksi : Bobby Rahman, S.Sos., M.Si (Ketua Prodi Ilmu Politik)
Wakil Ketua Redaksi : Teuku Muzaffarsyah, S.IP
Sekretaris : Nazaruddin, S.Sos., M.AP.
- Anggota Dewan Redaksi : Dahlan A. Rahman, S.Ag., MA.
Naidi Faisal, S.IP., M.Si.
Zulham, BA., MA.
Alfian, S.Hi., MA.
Mulyadi, S.Ag., MA.
M. Rizwan Haji Ali, S.Ag., MA.
Zulhilmi, S.IP., M.Si.
Muhammad Ridwan, S.IP., M.Soc.Sc
- Editor Ahli : Prof. Dr. Sity Daud (Universitas Kebangsaan Malaysia)
Prof. Dr. Taufik Abdullah, MA. (LIPI)
Prof. Drs. H. Yusni Saby, MA., Ph.D (UIN Ar-Raniry)
Prof. Dr. Djoko Suryo, MA (Universitas Gadjah Mada)
Prof. Dr. Dede Mariana (Universitas Padjadjaran)
Dr. Iskandar Zulkarnain, SE., M.Si.
Dr. Muntasir, S.Ag., MA.
Dr. Rasyidin, S.Sos., MA.
Dr. Muhammad Bin Abubakar, B.HSc., MA.
- Staf Tata Usaha : Safrizal, S.IAN
Arif Maulana, ST

EDITORIAL OFFICE

Program Studi Ilmu Politik - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh

Kampus Bukit Indah - Lhokseumawe

Telp/Fax : 0645 - 58450367 Email : ilmu_politik_unimal@yahoo.com

<http://www.unimal.ac.id>

<http://www.fisip-unimal.com>

Zulhilmi dan M. Akmal

Prodi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Malikussaleh

Email : hilmisakti@yahoo.com

A. PENDAHULUAN

Momentum kekalahan Jepang terhadap sekutu ketika terjadi penyerangan sentral wilayah Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Dua daerah tersebut ada sumber terpenting bagi otoritas Jepang dalam menghadapi perang Dunia. Pada bulan Agustus memberi suasana baru bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 maka teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan di dampingi oleh Muhammad Hatta dan beberapa Tokoh-tokoh nasional saat itu. Nuansa kemerdekaan tersebut menggema kesantereo Nusantara. Gaungnya terasa dari wilayah Barat hingga Timur Indonesia sehingga lahirnya negara Republik Indonesia. Khususnya wilayah Barat paling ujung yaitu Aceh yang senantiasa berharap kemerdekaan yang mutlak dan merasakan bagian dari negara Republik Indonesia.

Pada tahun 1945 dimulainya perlawanan rakyat Aceh terhadap kolonialis Belanda. Pada masa tersebut tentu merupakan sebuah catatan sejarah yang tidak pernah dilupakan Aceh. Perang Cumbok merupakan sebuah skema sejarah politik diawali pada Tahun 1945 – 1947. Tentunya perang Cumbok merupakan sebuah realita Sejarah politik Aceh yang muncul pada masa kemerdekaan baru seumur jagung terwujud di negara Indonesia.

Munculnya Dua kelompok yang pro dan kontra terhadap kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dinamika politik ini menjadi polemik yang muncul di Aceh. Perang Cumbok sesungguhnya adalah bentuk perlawanan Rakyat Aceh terhadap aksi kolonial Belanda. Walau kemerdekaan sudah di Raih oleh Indonesia namun di beberapa daerah masih terjadi gejolak termasuk di Aceh. Perselisihan dua kelompok yang saling bertentangan dalam dimensi kemerdekaan. Pihak yang mendukung kemerdekaan ini mengharapkan otoritas Jepang di nusantara segera pergi dan menolak datangnya kolonialisme Belanda kembali di Indonesia.

Pihak yang mendukung berdirinya kedaulatan Negara Indonesia adalah dari kalangan Ulama Aceh dan ingin lepas dari penjajahan dan menentang kembali kolonial baru kembali yaitu Belanda. Para ulama tersebut tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) mengharapkan Aceh bebas dari bentuk kolonisasi oleh Jepang dan menolak hadirnya Belanda di bumi Serambi Mekkah. Kelompok yang sangat menentang Aceh menerima kemerdekaan Indonesia adalah kelompok bangsawan Aceh (*Uleebalang*). Para bangsawan beranggapan bahwa rekolonialisasi Belanda merupakan momentum bagi tegaknya kekuasaan para bangsawan Aceh yang sangat aristokratif. Adanya

momok yang menakutkan bagi para bangsawan Aceh bila wilayah tersebut ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat itu para **Uleebalang** memiliki keistimewaan tersendiri sebagai tokoh politik secara domestik di Aceh. Para bangsawan ini telah lama menjalin kerjasama semenjak Belanda membentuk serikat Dagang (VOC). Kerjasama tersebut merupakan sebuah momentum tegaknya kekuasaan bagi kaum bangsawan yang ada di Aceh. Para Bangsawan merasa khawatir dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang didukung sepenuhnya oleh Aceh pasti akan menghilangkan keistimewaan sebagai **Uleebalang** yang telah disematkan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan ada perjanjian yang disebut **Korte Verklaring**. Istilah perjanjian tersebut terjadi setelah lumpuhnya kekuatan kerajaan Aceh antara Tahun 1496 sampai dengan tahun 1903.

Lumpuhnya kerajaan Aceh karena adanya pesekongkolan antara para **Uleebalang** dengan pemerintah kolonial Belanda. Para bangsawan Aceh mendedikasikan diri sebagai representasi dari perwakilan Pemerintah kolonial Belanda di Aceh. Proses politik ini menjadi stagnan karena adanya perdebatan yang panjang antara PUSA dengan **Uleebalang**. Dinamika politik ini terus berkembang hingga ditahun 1946 rakyat Aceh bersama PUSA berupaya menghalau segala bentuk kolonial yang akan diterapkan kembali di bumi Rencong. Sehingga Aceh terjadi gejolak politik yang sangat hebat antara para bangsawan dengan Ulama Aceh pada saat itu. Ketegangan tersebut memuncak dengan meletusnya perang

antara dua kalangan tersebut yang sering dikenal dengan Istilah "**prang cumbok**". Konflik bersenjata antara kedua kalangan yang ada di Aceh tidak terhindarkan. PUSA yang sebelumnya berupaya menghindari terjadinya pertumpahan darah terpaksa harus melawan peperangan yang dimulai oleh para bangsawan Aceh.

Awalnya para Ulama-Ulama karismatik PUSA banyak yang ditangkap dan dibunuh oleh para **Uleebalang**. Hal ini, menyebabkan terjadinya konflik dan perang pun muncul untuk mempertahankan kedaulatan kemerdekaan negara Indonesia di Aceh. Dukungan penuh mengalir dari seluruh rakyat Aceh yang dulunya sering ditindas dan hak-haknya terdiskriminasi oleh kekuasaan feodal para bangsawan Aceh. Rakyat Aceh mendukung perlawanan dari PUSA untuk menindak kekejaman para **uleebalang** yang sangat mendukung aksi feodal dari kolonial Belanda. Sikap yang ditunjukkan oleh seluruh rakyat Aceh memberikan gambaran bahwa segala bentuk penjajahan dihapuskan dari tanah Aceh. Sikap perlawanan yang ditunjukkan oleh PUSA terhadap **uleebalang** merupakan sebuah framing konflik yang muncul karena sikap para bangsawan yang terlalu mementingkan kekuasaan politik. **Prang Cumbok** dimulai pada bulan Desember 1945 hingga Januari 1946 dimana adanya proses Revolusi yang terjadi di Aceh dimana kekuatan PUSA dan rakyat bersatu untuk melawan segala bentuk kekuasaan para bangsawan Aceh yang lebih mementingkan kekuasaan politik Aristokrat.

Perang tersebut mencapai kisaran setahun terjadi dan ini merupak

proses politik yang panjang terjadi di Aceh hingga menyebabkan terjadinya konflik bersenjata. Beberapa petinggi politik di Aceh tidak mampu meredam perseteruan tersebut karena kekuatan yang paling dominan adalah PUSA dan *Uleebalang*. Hal ini dikarenakan para petinggi Aceh berada di dalam kedua kalangan tersebut. Hal ini yang memberikan peluang terciptanya *prang cumbok* yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa dari kedua belah pihak. Dalam proses politik tersebut rakyat Aceh lebih cenderung memberikan dukungan kepada PUSA karena sudah lama mengalami penderitaan dengan sistem feodal yang diterapkan oleh Belanda melalui kaki tangannya yaitu para bangsawan Aceh. Kekuasaan para bangsawan Aceh tersebut muncul karena adanya kekuatan secara otonom yang diberikan oleh Belanda setelah terjadinya perang Aceh yang menumbangkan kekuasaan monarki kesultanan sehingga menjadi momentum yang tepat bagi kaum *uleebalang* sebagai representasi otonom dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Bangsawan Aceh sangat naif dalam menentukan sikap politiknya dalam mendukung kolonialisme dengan menggunakan cara-cara atau sistem feodal. Hal ini, yang mengakibatkan para *Uleebalang* Aceh tersebut ingin mendapatkan porsi kekuasaan yang istimewa di Aceh. Beberapa tokoh sentral dari ulama Aceh yang terbunuh tersebut hanya untuk memperlemah kekuatan PUSA. Hal ini dilakukan untuk menyongsong kembalinya kekuasaan feodal bagi para *Uleebalang* yang diberikan oleh kolonial Belanda yang telah berhasil mengalahkan Jepang

pada perang Dunia kedua. Tentunya pola gerakan PUSA ini merupakan sebuah bentuk perlawanan Rakyat Aceh terhadap sistem feodal dari Belanda. Wajar bila perdebatan terjadi dengan melihat aspek kekuasaan feodal yang berlaku pada masa kolonial Belanda berkuasa dengan melakukan kerjasama terhadap Belanda di era 1903.

Perang Cumbok yang terjadi di Aceh membuktikan bahwa masyarakat Aceh anti terhadap bentuk kolonialisasi yang akan kembali dilancarkan oleh Belanda melalui tokoh-tokoh domestik Aceh dari kaum bangsawan. Aristokrasi semakin memperkokoh aksi feodal kekuasaan dalam segi ekonomi masyarakat di Aceh. Sesungguhnya tatanan sosial yang dibangun oleh *Uleebalang* merupakan sebuah aspek feodalisasi sistem kekuasaan secara politik sehingga menjadikan Aceh masih dibawah penjajahan Belanda hal ini yang tidak dibiarkan terjadi oleh para Ulama Aceh. Beberapa hal yang perlu dirumuskan bahwa mengkaji tujuan dari pada *Uleebalang* kembali menjalin kerja sama pada Belanda pasca kekalahan Jepang terhadap sekutu.

B. KAJIAN AWAL

1. Asal Mula Kejayaan Aceh

Pergerakan politik pada tahun 1945 sampai dengan 1947 merupakan sebuah momentum awal terjadinya proses kedewasaan dalam berdinamika. Proses politik yang terjadi memang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam dengan menggunakan resistensi sejarah politik. Memahami literatur politik pada masa itu adanya ketegangan secara politik antara kedua kelompok yang bertikai sehingga terjadi pertumpahan darah. Perang antara Kolonial Belanda

dengan Aceh dimulai pada tahun 1873 yang tidak saja menelan banyak korban Jiwa di kedua pihak maupun masyarakat Sipil. Perang Aceh-Belanda hampir mencapai klimak karena berjan begitu lama hingga mencapai tujuh Dekade serta berakhir pada tahun 1942. Tentunya pergerakan politik Aceh sangat kompleks dan menjadi sebuah skema yang mampu memberikan ruang yang sama dengan bangsa lain. Hal ini yang membuat Aceh merasa sangat pantas di sejajarkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Perang Aceh dan Belanda masuk ke dalam kategori perang colonial terlama di seluruh Asia hingga mencapai dekade ke tujuh. Secara struktur pemerintahan Monarki Aceh kala itu memiliki dua kekuatan yang elegan serta adanya kapasitas kekuatan kerajaan yaitu adanya ketatanegaraan yang melaksanakan pemerintahan (Adat) dan teologi (agama) Islam (Saleh,- 22 : 1992). Dari sisi adat dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan monarki dijalankan oleh kalangan Uleebalang atau bangsawan Aceh. Kalangan ini yang merupakan penguasa wilayah di Aceh secara tradisional dan membentuk bangsawan-bangsawan seperti Adipati di kerajaan Majapahit dan Demak misalnya. Sementara secara agama dan membuat aturan-aturan sesuai dengan teologi Islam dijalankan oleh Ulama. Kalangan ini di Aceh merupakan simbol teologi dan kebudayaan Aceh yang sangat Islami. Kalangan tersebut merupakan dua organ penting dalam nadi keberlangsungan kerajaan Aceh. Kedua elemen tersebut merupakan kunci untuk menaklukkan kerajaan Aceh. Hal ini tidak terlepas dari peran seorang

snock H ilmuwan Belanda yang melakukan penelitian di Aceh sehingga mengetahui seluk-beluk masyarakat Aceh.

Organ – organ penting tersebut yang memberikan sebuah pola pemerintahan, kebudayaan, adat, dan ketatanegaraan pada kerajaan Aceh. Kedua elemen tersebut merupakan ruh secara moralitas Aceh yang Islami dan adanya hamonisasi yang memberikan sebuah gambaran bahwa Aceh disebut dengan "*Koetaradja*" istilah yang diberikan oleh Belanda. Selanjutnya dua elemen politik tersebut juga memainkan peranan dalam penyelenggaraan kewenangan Raja sehingga mereka mendapatkan kemuliaan dan dihormati oleh seluruh masyarakat Aceh. Selain itu bangsa-bangsa di dunia memberikan gambaran bahwa kerajaan Aceh adalah wilayah yang kuat dan disegani diwilayah Asia. Sebagai negara sultanah Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda berjalan secara elegan harmonis sejak tahun 1607 sampai tahun 1636. Dekade tersebut belum masuknya penjajahan Belanda.(Hasan Tiro : 1948). Pada masa tersebut merupakan kejayaan dari kerajaan Aceh. Peradaban masyarakat Aceh tercatat pada buku penelitian Snock H yang menggepalkan dunia dan menjadi Strategi politik belah bambu kolonial Belanda. Keberhasilan Belanda tidak terlepas dari sumbangsih pemikiran dan penelitian ilmuwannya yang handal tersebut yang telah berhasil mengetahui rahasia terbesar dari pola kekuatan kerajaan Aceh.

2. Pada Era Pendudukan Kolonialisme

Pada masa pendudukan kolonial Belanda di Aceh, paradigma perjuangan

semakin terasa dimana dua elemen tersebut memberikan sebuah perlawanan dan anti penjajahan. Peperangan di Aceh semakin berat dan tiada henti yang memunculkan sebuah makna kekerasan. Hal ini merupakan ketegasan masyarakat Aceh yang anti terhadap kolonial. Perlawanan terhadap Belanda telah membentuk sebuah pola kerjasama yang utuh antara *Uleebalang* dengan ulama dalam perang memiliki totalitas yang tinggi. Ikatan yang kokoh tersebut memberikan sebuah pola penguatan yang sangat relevan. Perang Aceh dapat dimaknai dalam berbagai konteks sesuai dengan kedua persepsi dengan melihat paradigma masing-masing. Pandangan *Uleebalang* melihat perang sebagai sebuah uji kekuatan antar negara Aceh dengan negara Belanda. Istilah Perang secara nasional Aceh dimana sama halnya dengan perseteruan antar negara. Selanjut menurut dimensi Ulama perang tersebut sebagai tujuan yang mulia menuju syahid di jalan Allah SWT. Perang melawan kezaliman dari *Khape Beulanda* merupakan sebuah penafsiran dalam istilah *Hikayat Prang Sabi* (Ibrahimi :1996).

Hal ini memberikan gambaran bahwa sesungguhnya konsep perang tersebut dimaknai dengan sangat penting oleh kedua elemen tersebut dalam bentuk perlawanan yang massif. Perang tersebut dapat digolongkan dalam beberapa bagian sesuai persepsi masing-masing seperti perang nasional dan *Hikayat Parang Sabi*. Dapat dikatakan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh kedua organ di Aceh terhadap kolonial Belanda merupakan bentuk perlawanan ketidakadilan. Perpaduan tersebut maka muncul

konsepsi perang dalam paradigma masyarakat Aceh sebagai perang negara atau Perang suci menuju tujuan suci yaitu *syahid fisabilillah*. Kategori perang yang frontal dimana ada beberapa bagian yang saling berhubungan antara perang nasional dipadukan dengan perang teologi dalam menindak lanjuti aksi kolonial yang sangat diskriminatif. Hal ini, merupakan sebuah pergerakan yang progressif dan alami ketika dihubungkan dengan konteks manusia yang memiliki keyakinan secara politik dengan yang disebut *Fighting of the state* atau rela berkorban demi tanah air dan siap mati demi negara tercinta. Sementara ritual perang Agama merupakan konsepsi melawan bentuk ketidakadilan dalam mempertahankan kemerdekaan serta kebebasan menuju pada sebuah negara yang memiliki kedaulatan yang tidak boleh dikuasai oleh pihak manapun.

Istilah Mati demi negara dan Syahid menuju jalan Tuhan merupakan sebuah pola yang muncul dalam hubungan antara Ulama dan *Uleebalang* yang melahirkan perang nasionalis teologi. Era pertama perang Aceh terjadi pada tahun 1873-1880 dimana melibatkan tentara Aceh dengan kolonial Belanda dalam bentuk perlawanan terbuka. Perang tersebut memunculkan manifestasi pertikaian antar-bangsa dimana adanya konsep offensif dan difensif. Pada fase kedua perang frontal dimana pada fase pertama terjadi banyak korban yang berjatuhan. Selanjutnya Fase kedua melihat semakin panjangnya peperangan maka dilakukan dengan melihat kondisi yang perlu adanya pertahanan diri. Sistem gerilya merupakan salah satu cara dalam

semakin terasa dimana dua elemen tersebut memberikan sebuah perlawanan dan anti penjajahan. Peperangan di Aceh semakin berat dan tiada henti yang memunculkan sebuah makna kekerasan. Hal ini merupakan ketegasan masyarakat Aceh yang anti terhadap kolonial. Perlawanan terhadap Belanda telah membentuk sebuah pola kerjasama yang utuh antara *Uleebalang* dengan ulama dalam perang memiliki totalitas yang tinggi. Ikatan yang kokoh tersebut memberikan sebuah pola penguatan yang sangat relevan. Perang Aceh dapat dimaknai dalam berbagai konteks sesuai dengan kedua persepsi dengan melihat paradigma masing-masing. Pandangan *Uleebalang* melihat perang sebagai sebuah uji kekuatan antar negara Aceh dengan negara Belanda. Istilah Perang secara nasional Aceh dimana sama halnya dengan persetujuan antar negara. Selanjut menurut dimensi Ulama perang tersebut sebagai tujuan yang mulia menuju syahid di jalan Allah SWT. Perang melawan kezaliman dari *Khape Beulanda* merupakan sebuah penafsiran dalam istilah *Hikayat Prang Sabi* (Ibrahimi :1996).

Hal ini memberikan gambaran bahwa sesungguhnya konsep perang tersebut dimaknai dengan sangat penting oleh kedua elemen tersebut dalam bentuk perlawanan yang massif. Perang tersebut dapat digolongkan dalam beberapa bagian sesuai persepsi masing-masing seperti perang nasional dan *Hikayat Parang Sabi*. Dapat dikatakan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh kedua organ di Aceh terhadap kolonial Belanda merupakan bentuk perlawanan ketidakadilan. Perpaduan tersebut maka muncul

konsepsi perang dalam paradigma masyarakat Aceh sebagai perang negara atau Perang suci menuju tujuan suci yaitu *syahid fisabilillah*. Kategori perang yang frontal dimana ada beberapa bagian yang saling berhubungan antara perang nasional dipadukan dengan perang teologi dalam menindak lanjuti aksi kolonial yang sangat diskriminatif. Hal ini, merupakan sebuah pergerakan yang progressif dan alami ketika dihubungkan dengan konteks manusia yang memiliki keyakinan secara politik dengan yang disebut *Fighting of the state* atau rela berkorban demi tanah air dan siap mati demi negara tercinta. Sementara ritual perang Agama merupakan konsepsi melawan bentuk ketidakadilan dalam mempertahankan kemerdekaan serta kebebasan menuju pada sebuah negara yang memiliki kedaulatan yang tidak boleh dikuasai oleh pihak manapun.

Istilah Mati demi negara dan Syahid menuju jalan Tuhan merupakan sebuah pola yang muncul dalam hubungan antara Ulama dan *Uleebalang* yang melahirkan perang nasionalis teologi. Era pertama perang Aceh terjadi pada tahun 1873-1880 dimana melibatkan tentara Aceh dengan kolonial Belanda dalam bentuk perlawanan terbuka. Perang tersebut memunculkan manifestasi pertikaian antar-bangsa dimana adanya konsep offensif dan diffensif. Pada fase kedua perang frontal dimana pada fase pertama terjadi banyak korban yang berjatuh. Selanjutnya Fase kedua melihat semakin panjangnya peperangan maka dilakukan dengan melihat kondisi yang perlu adanya pertahanan diri. Sistem gerilya merupakan salah satu cara dalam

pertahanan diri dan fase tersebut terjadi pada tahun 1880 sampai dengan 1905. Pola peperangan tersebut sangat dinamis dan statis serta memiliki durasi yang sangat pendek dengan sistem gerilya tersebut. Dalam hal ini para petinggi perang di Aceh baik Ulama maupun para bangsawan Aceh meninggalkan area perkotaan dan sering berpindah-pindah antar wilayah dan masuk kedalam hutan belantara melakukan dimensi perang gerilya. Fase ini sangat rumit dan memberikan gambaran bahwa kekuatan perang semakin mempersulit ruang gerak perlawanan sehingga perlu dilakukan pola gerilya.

Pada fase ketiga ini semakin mempersulit kondisi Aceh sehingga sistem gerilya di ganti dengan perang individual. Perang dalam pandangan orang Aceh telah lazim dan menjadi kebutuhan dalam memberikan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Fase ini terjadi antara tahun 1910 sampai dengan tahun 1930 dimana dapat dimaknai perang sebagai sebuah hal yang lazim serta menjadi orientasi yang sangat elegan bagi perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan Belanda. Pada tahun setelah fase tersebut konsolidasi politik terjadi antara kedua organ tersebut dimana situasi dunia yang semakin tidak menentu dengan munculnya perang dunia kedua. Pada tahun 1933 dengan masuknya penjajahan Jepang memberikan sebuah pemahaman tentang konsolidasi yang massif untuk mengantisipasi munculnya kolonialisme baru. Ketiga fase tersebut banyak dari tokoh-tokoh di kedua organ tersebut syahid dalam perang dengan Belanda. Sehingga banyak yang tersisa dari

kedua orang tersebut yang tidak memiliki ikatan secara moral dan politik dengan perang yang berada pada tiga fase tersebut. Di sini awal mula terjadinya perdebatan antara kedua organ tersebut sehingga berimbas pada munculnya perang Cumbok.

3. Pada Masa Tahun 1945-1947

Munculnya proklamasi kemerdekaan memberikan nuansa baru dalam wilayah nusantara. Para elite politik di Aceh memiliki pandang dan orientasi politik sehingga memiliki pandangan yang berbeda mengenai hadirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Orientasi politik ini tercemin dari tanggapan yang beragam mengenai proklamasi yang telah dilaksanakan oleh tokoh politik bangsa. Konstelasi politik sesudah proklamasi merupakan sebuah diskursus yang merfleksikan dimulainya "revolusi besi" di Aceh dari interaksi antar elite di daerah tersebut. Kelompok pertama dalam golongan elite Aceh adalah kaum bangsawan Aceh. Kelompok *Uleebalang* secara tradisional adalah penguasa lokal yang ada di Aceh yang memiliki keistimewaan tersendiri (Reid : 2001). Walaupun sangat tradisional secara sederhana *Uleebalang* digolongkan sebagai suatu kelompok yang memiliki status yang berbeda tergantung dari sistem yang dianut dalam wilayah tersebut di Aceh. Perbedaan status ini berkaitan erat dengan usia silsilah dengan Sultan Aceh, dan otoritas politik dalam tata feodal seperti luas daerah kekuasaan, dan sebagainya.

Elite ulama, yang secara tradisional merupakan pemimpin spiritual dalam masyarakat Aceh. Seperti halnya dengan golongan

bangsawan atau uleebalang, mereka yang tergolong dalam kelompok elite ulama ini memiliki status yang berbeda sejalan dengan kualitas ilmu yang dimilikinya. Di samping itu, elite ulama ini dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu elite ulama modernis dan elite ulama ortodoks. Di antara kedua kelompok ini tampaknya elite ulama modernis yang sudah mempunyai organisasi yang agak teratur yaitu PUSA. Dengan demikian mereka mempunyai jaringan komunikasi dengan seluruh anggotanya yang tersebar di seluruh Aceh (Alfian, 1982 : 65).

Kedua elemen tersebut merupakan golongan politik yang penting dalam memperkuat pergerakan kerajaan Aceh. Tentunya pasca kemerdekaan pergerakan memberikan sebuah respon yang stagna dimana para *Uleebalang* terus berupaya mempertahankan kekuasaannya melalui perpanjangan tangan kolonial Belanda yang kembali menguasai Indonesia. Para bangsawan ini beranggapan bahwa kekuasaan lokal dan keistimewaan secara adat dan pemerintahan akan di dapat jika didukung penuh oleh otoritas kolonial Belanda. Sementara PUSA berharap kolonial Belanda tidak kembali lagi untuk menguasai kedaulatan Indonesia Pasca Proklamasi kemerdekaan. Namun elite ulama ortodok pada umumnya menjalankan tradisi tradisionalnya pada pesantren – pesantren (*Dayah*) yang menjadi pusat pendidikan Agama Islam di Aceh.

Kelompok elite yang muncul juga ada pemuda. Secara kasar mereka dapat digolongkan kepada dua golongan, yaitu elite-pemuda yang

mendapat pendidikan militer Jepang dan elite pemuda yang mendapat pendidikan sekolah keagamaan modernis. Mereka yang termasuk kelompok elite pertama umumnya bersatu untuk membentuk angkatan bersenjata di Aceh yaitu API . Sedangkan kelompok elite kedua, membentuk badan-badan kelaskaran. Sungguhpun di antara mereka terdapat kepentingan politik tertentu, tetapi di antara para elitnya mempunyai hubungan tradisional melalui organisasi Pemuda PUSA (Alfian, 1982 : 66). Kekuatan pemuda ini terletak pada pemikiran yang modernis dan teologis bersatu membentuk API. Selain itu ada juga golongan minoritas dimana adanya para cendekiawan dan pemimpin, namun golongan ini berasal dari luar daerah Aceh. Golongan minoritas ini terdiri dari beberapa orang saja yang beraktualisasi di Aceh dalam taraf yang wajar.

Proklamasi kemerdekaan dan kevakuman kekuasaan akibat penyerahan kekuasaan Jepang kepada sekutu, diberi tafsiran dan tanggapan oleh masing-masing kelompok. Di antara kelompok elite itu tampaknya kelompok elite ulama (terutama modernis) dan pemuda yang amat bernafsu untuk meraih pengaruh pada waktu itu. Mereka melihat jalur militer merupakan jalur yang ampuh untuk meraih kekuasaan. Justeru itu, mereka membentuk lembaga militer atau kelasykaran, yang bakal dijadikan ujung tombak bagi perwujudan orientasi politiknya. Di pihak lain, kelompok elite bangsawan yang masih tetap meneruskan tradisi pemerintah lokal pada mulanya tidak membentuk pasukan militer ataupun kelaskaran

(Alfian, 1982 : 67). Tentunya ada sebuah penjabaran dalam menafsikan tentang kelayakaran yang dinyatakan tersebut maka perdebatan antara ulama dan para bangsawan Aceh semakin memuncak dalam mempertahankan pandangannya yang justeru memperkeruh suasana politik. disini puncak terjadinya perdebatan antara kedua kelompok tersebut yang mengakibatkan terjadinya pertempuran atau **Prang Cumbok**.

Pola representasi dari kolonialis Belanda yang dipertahankan oleh **Uleebalang** mengakibatkan terjadinya perseteruan yang panjang. Para tokoh Pemuda juga mendukung apa yang ditentang oleh PUSA. Sesuatu yang diperjuangkan dengan susah payah oleh Republik Indonesia yang bebas merdeka dan berdaulat dan terhapus dari kolonialisme. Sikap PUSA yang sudah cukup puas terhadap dengan membina API yang dibentuk oleh para pemuda mantan serdadu Gyu Gun didikan milet Jepang memberikan nuansa adanya kecurigaan para **Uleebalang** adanya konspirasi besar yang dilakukan oleh PUSA. Hal ini, ditandai dengan muncul laskar-laskar pemuda.

Sikap kecurigaan itu pada tingkat tertentu membawa kepada konflik seperti yang telah terjadi antara Asisten Residen Teuku Cut Hasan dengan satuan lasykar BPI pada waktu upacara pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih di Sigli, demikian juga halnya dengan peristiwa yang sama antara satuan BPI dengan uleebalang Cumbok di Lameulo Nazaruddin (Syamsuddin, 1999 : 122). API juga merasa sangat kecewa dengan sikap **Uleebalang** yang merasa curiga

terhadap bangsawan sehingga membentuk tentara-tentara bayangan. Sikap kecurigaan demikian bisa difahami bila dihubungkan dengan hubungan yang terjalin antara pemimpin kelayakaran dan pengurus PUSA yang berkedudukan di Pidie tambahan lagi kekuatan API yang belum begitu tangguh (Alfian, 1982 : 67). Insiden di wilayah Sigli dan Lameulo menimbulkan reaksi yang meluas dikalangan elite ulama dan para pemuda Aceh yang tergabung dalam API. Mereka menafsikan ini adalah bentuk perlawanan terhadap kedaulatan Republik yang telah di akui oleh dunia. Walaupun para bangsawan di Pidie merasa dirinya terancam oleh reaksi yang dilancarkan oleh pihak ulama dan kelayakaran. Ditambah lagi dua **Uleebalang** yang turut bersatu dengan PUSA dan kelayakaran dan mendedikasikan diri sebagai bagian dari mereka seperti Teuku Nyak Arief dan Teuku Panglima Polem Muhammad Ali dalam insiden yang terjadi di kedua wilayah tersebut.

Menyadari situasi demikian, Teuku Umar Keumangan, Beureunun, mengambil prakarsa untuk melaksanakan pertemuan uleebalang pada tanggal 22 Oktober 1945 di Beureunun, Pidie. Pertemuan untuk membicarakan masalah konsolidasi kekuatan dan memperkuat solidaritas antara para elite uleebalang tampaknya tidak semulus yang diharapkan. Hal demikian tampak pada ketidak hadiran beberapa orang di antara mereka. Di sini jelas menunjukkan terjadinya perbedaan kepentingan dari masing-masing uleebalang. Sungguhpun terdapat beberapa uleebalang di daerah Pidie yang tidak menghadiri pertemuan

itu, namun mereka berhasil mengambil sikap terhadap gerakan-gerakan revolusioner yang sedang berkembang di daerah Aceh umumnya dan Pidie khususnya (Alfian, 1982 : 67). Hal ini yang memunculkan stigma dari beberapa para bangsawan sehingga adanya upaya untuk melemahkan tujuan dari para *Uleebalang*. Maka para bangsawan melancarkan strategi yang lebih inklusif dalam menandingi reaksi para ulama dan kelasyakaran yang kukuh mendukung tegaknya kedaulatan republik Indonesia.

4. Perang Cumbok (Ulama - *Uleebalang*)

Pada akhirnya peristiwa perang saudara tidak terhindarkan dalam mempertahankan paradigma masing-masing mengenai dimana adanya sebuah perwujudan yang dilakukan oleh *Uleebalang*. perwujudan tersebut menghimpun pergerakan yang tentunya dapat memberi perlawanan yang sangat elegan terhadap ulama dan kelasyakaran. Tentunya hal ini memberikan sebuah gambaran mengenai sebuah perlawanan yang muncul dari para bangsawan sehingga memberi sebuah deklarasi yang dimulai dikawasan Pidie tentunya disini awal terjadinya sebuah persetujuan politik antara *Uleebalang* dengan ulama yang didukung oleh kelompok-kelompok kelasyakaran. Perang saudara tidak terhindari yang disebut masa revolusi Aceh dalam menentukan hak kedaulatan pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini yang terjadi antara desember 1945 sampai Januari 1946. Pertikaian antara sesama golongan di Aceh bertahab selam setahun hingga akhirnya berhasil

diredam oleh kalangan ulama dengan adanya bantuan dari lasykar-lasykar dan juga tentara-tentara nasional dalam mempertaruhkan kedaulatan negara di Aceh

Sikap itu diwujudkan dalam langkah usaha pembentukan *markas uleebalang* dibawah pimpinan Teuku Muhammad Daud Cumbok dengan berkedudukan di Lameulo. Untuk menandingi lasykar- lasykar yang sudah terbentuk di Aceh, lalu mereka memandang perlu untuk membentuk badan kelasyakaran yang akan menjadi ujung tombak mereka, yaitu Barisan Penjaga Keamanan (BPK) dan Perhimpunan Indonesia. Di antara kedua kelasyakaran itu hanya BPK yang tumbuh dan berkembang. Lasykar tersebut dalam perkembangan berikut dipecah atas 3 satuan, yang masing-masing mempunyai misi khusus. Ketiga satuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barisan Cap bintang dengan tugas utama menghadapi perlawanan rakyat yang menentang kekuasaan para uleebalang.
2. Barisan cap sauh dengan tugas utama di bidang usaha keuangan untuk membiayai gerakan mereka.
3. Barisan cap tombak dengan tugas utama menangkap para pemimpin rakyat (lasykar) yang menentang atau menghalang- halangi mereka (Syamsuddin, 1999 : 123).

C. PEMBAHASAN

Istilah *Uleebalang* dalam bahasa Aceh mengacu kepada seseorang yang mengepalai *nanggroe* (suatu wilayah otonom / federasi), yang wewenangnya diberikan oleh Sultan Aceh –sebagai perwakilan Sultan di daerah– melalui

pembubuhan *Cap Sikureueng* (cap sembilan) pada surat pengangkatan *uleebalang*. Para *uleebalang* identik dengan gelar "Teuku". Dan, bagi keturunannya yang lelaki tetap menggunakan gelar "Teuku" (disapa 'Ampon' atau disingkat 'Pon'); sedangkan anaknya yang perempuan menyandang gelar "Po Cut" atau "Cut" saja. Dalam teritorial yang berada di bawah kekuasaan *uleebalang*, wewenang Sultan Aceh hanya sekadar formalitas belaka. Sehingga *uleebalang* dapat bertindak bebas tanpa perlu persetujuan dari Sultan. Wilayah *nanggroe* yang dipimpin oleh *uleebalang*, kemudian diadopsi oleh kolonial Belanda dengan nama *Land Schoppen*; sedangkan *uleebalang*-nya disebut *Zelfbestuurder* (penguasa wilayah otonom) (Ibrahimy, 2001 : 84-85). Tentunya kekuasaan *Uleebalang* memberikan ruang kekuasaan yang luas di wilayahnya secara tradisional. Kerangka strategi penguasaan terpusat pada sistem tata kelola pemerintahan yang menjadi sebuah catatan sejarah.

Menurut Hasan Saleh, yang juga pelaku sejarah dalam peristiwa Perang Cumbok, ketika kolonial Belanda mulai menjalankan administrasi pemerintahannya di Aceh, *uleebalang* selaku perwakilan kolonial Belanda yang terikat dengan perjanjian, diberikan hak-hak eksklusif, yang antara lain:

- 1) Di bidang Eksekutif, *uleebalang* berhak memerintah sebagai wakil kolonial Belanda di Aceh;
- 2) Legislatif, diatur berdasarkan adat-istiadat menurut kehendak masing-masing (pribadi) *uleebalang*; dan
- 3) Yudikatif, dibentuk lembaga peradilan yang disebut *Land*

Scheepsrecht dalam bahasa Belanda (bahasa Aceh *musapat*), yang berwenang menjatuhkan hukuman apa pun terhadap pihak-pihak yang tidak disukai oleh *uleebalang*, sehingga membawa konsekuensi penderitaan dan malapetaka bagi rakyat Aceh. Kekuasaan lembaga peradilan ini sangatlah luas, tidak hanya mencakup bidang sipil dan pidana, tetapi juga meliputi masalah keagamaan serta masalah nikah, pasah, talak dan rujuk. Luasnya jangkauan kekuasaan yang berada di bawah wewenang *uleebalang*, maka dengan mudah seorang isteri diceraikan dari suaminya untuk dipersunting oleh *uleebalang* yang berhasrat pada isteri yang diceraikan tersebut. Sehingga muncul frasa yang menunjukkan kekesalan di dalam masyarakat Aceh pada waktu itu: "*uleebalang; tanoh gob, tanoh jih; inong gob, inong jih.*" (*uleebalang*; tanah orang, tanah dia; isteri orang, isteri dia) (Saleh, 1992).

Kondisi pada saat *uleebalang* berkuasa di Aceh yang dikaji oleh Belanda sangat mirip dengan tatanan kebudayaan Hindu yang menggunakan sistem kasta. Masyarakat dilihat dari silsilah keturunannya dan dapat dikategorikan sebagai perbedaan tingkatan sosial. Pola tersebut merupakan alur kekuasaan bagi kaum *Uleebalang* yang selalu dihormati dan di hargai. Sistem pada tatanan sosial yang berlaku di Aceh pada masa kerajaan sangat kompleks sehingga polarisasi mengakibatkan terjadi perdebatan hingga adanya terpecah belah

masyarakat. Sistem feodalisme semacam ini semakin memperkuat pola kekuasaan tradisional terhadap *Uleebalang*. Hal ini semakin memunculkan stigma bahwa para *Uleebalang* kembali menerima kolonialisme Belanda. Hal ini tidak terlepas makin buruknya situasi negeri kutaradja. Penyelenggaraan pemerintahan dan berlakunya administrasi sipil memberi mandat sebagai penyelenggara dan mulai dijalkan oleh para *Uleebalang*.

Sistem Feodal ini yang memperkuat kekuasaan *Uleebalang* dengan mengembangkan sayapnya dan bagian dari representasi dari kolonialis Belanda. Suasana tidak nyaman terasa dalam rangka meraih pengaruh di kalangan masyarakat luas, terutama di daerah basis BPK, yaitu Lameulo. Suasana tidak aman dalam proses interaksi mereka pada tingkat tertentu menimbulkan konflik. Di antaranya dapat disebutkan tindakan penangkapan terhadap beberapa anggota satuan PRI di Lameulo pada tanggal 3 November 1945. Malahan pada tanggal 8 November 1945 kantor PRI Lameulo mereka duduki (Syamsuddin, 1999 : 128). Hal ini menjadi sebuah sumber masalah yang dimunculkan oleh para *Uleebalang* yang mengakibatkan terjadinya permusuhan antara para ulama dan *Uleebalang*. Perlakuan yang diterima oleh satuan lasykar PRI Lameulo menimbulkan perpecahan dua golongan tersebut. Hal tersebut segera disampaikan kemarkas induk di Kutaradja sehingga menimbulkan persoalan serius bagi pemerintah daerah. PRI adalah institusi atau lasykar yang sangat berpengaruh kala itu di Aceh dan sangat tangguh.

Kekhawatiran pemerintah daerah akan adanya aksi balas dendam yang dilakukan oleh pihak PRI dan lasykar lain.

Situasi *kolaps* yang menimpa Kerajaan Aceh pada ekspedisi kedua kolonial Belanda (9 Desember 1873) memberikan kesempatan pada upaya kolaborasi kolonial Belanda – *Uleebalang*, yang telah dimulai sejak tahun 1876, merupakan gagasan dari Teuku Nek Meuraksa, seorang *uleebalang* yang memimpin wilayah dekat Kutaradja (sekarang Banda Aceh). Di mana para *uleebalang* yang menyerah dan memimpin suatu wilayah di bawah kekuasaannya yang absolut dan turun-temurun, mengadakan perjanjian dengan kolonial Belanda agar kekuasaannya dapat bertahan dan tidak mengalami situasi seperti Kerajaan Aceh, yang dikenal sebagai *Korte Verklaring* (perjanjian pendek), yang terdiri dari 18 pasal. Inti dari perjanjian ini menegaskan bahwa:

- 1) Wilayah *uleebalang* merupakan bagian dari Hindia Belanda;
- 2) Dijaga jangan sampai terlibat tanpa izin dengan orang asing; dan
- 3) Mengizinkan pengawasan oleh Belanda sepanjang menyangkut bea-cukai dan pungutan-pungutan lain jika diperlukan. (Reid, 2005 : 301)

Tuaniku Mahmud yang menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Daerah terpaksa mengirimkan wakil ke Lameulo untuk memperdamaikan sengketa yang terjadi antara PRI dan BPK " Suasana hubungan yang berlangsung antara markas Uleebalang dengan lasykar-lasykar di Aceh tampaknya kian hari kian bertambah tegang. Dalam suasana tegang itu berkembang issue tentang

pembentukan *Comité van ontvangst* di Lameulo yang bertujuan untuk mempersiapkan kedatangan Belanda. Issue tersebut dipergunakan oleh pihak kelasykaran dan kelompok revolusioner untuk menyudutkan gerakan markas uleebalang. Setelah berhasil mematahkan gerakan PRI di Lameulo, Markas Uleebalang mengalihkan perhatiannya ke Sigli, yaitu untuk memperoleh senjata dari serdadu Jepang yang bakal meninggalkan daerah Aceh. Tindakan ini perlu dilakukan secepatnya agar senjata itu jangan jatuh ke tangan lasykar-lasykar revolusioner (Alfian, 1982, 69-70).

Kedatangan dua kelompok lasykar yang saling bertentangan untuk memperoleh senjata dari tangan serdadu Jepang menimbulkan suatu hal yang pelik baik di pihak Jepang maupun di pihak TKR. yang pada waktu itu amat kecil jumlahnya. Ini dapat dimengerti karena kedua satuan lasykar saling mengklaim dirinya sebagai yang berhak. Untuk menghindari jangan sampai terjadi krisis antara kedua lasykar, pihak TKR menawarkan jasa baik agar pihak Jepang mau menyerahkan senjata kepada TKR. Namun pihak Jepang tampaknya tidak berhasil diyakinkan oleh TKR. Malahan mereka memberi jawaban bahwa pemerintah pendudukan Jepang masih terikat perjanjian dengan sekutu (Amin, 1978 : 133). Strategi yang dilakukan oleh BPK dalam melancarkan aksinya dan berupaya untuk memasuki kota Sigli kala itu tentunya ada sebuah skema yang dibentuk dalam mematahkan strategi dari satuan lasykar PRI. Namun rencana yang dilaksanakan oleh BPK mengalami jalan buntu setelah diketahui oleh lasykar PRI oleh karena

itu mereka berupaya menghalangi agar persenjataan tersebut tidak sampai jatuh ketangan kelompok BPK.

Hal ini dapat dilihat pada buku karangan Dr T. Ibrahim Alfian, MA dan Kawan-kawan dimana perkembangan selanjutnya ternyata Jepang menyerahkan sebagian senjata kepada satuan lasykar BPK. Tindakan itu menimbulkan suasana genting antara BPK dengan PRI. Akibatnya terjadilah bentrokan senjata antara kedua lasykar itu pada permulaan Desember 1945. Bentrokan senjata yang berlangsung antara BPK dan PRI di Sigli mengundang perhatian pemerintah daerah. Atas inisiatif pemerintah daerah melalui TKR , pertempuran yang berlangsung di Sigli dapat dihentikan (6 Desember 1945). Jalan penyelesaian yang ditempuh yaitu pengosongan kota Sigli oleh kedua lasykar, penyerahan- keamanan kota Sigli kepada TKR , dan penyerahan senjata kepada TKR. Dengan terhentinya pertempuran di kota Sigli tidak berarti perdamaian telah tercapai. (Alfian, 1982 : 70). Tentu antara lasykar dengan para pendukung uleebalang terus melakukan pertempuran. Hal tersebut merupakan perlawanan perlawanan rakyat terhadap penguasa yang menggunakan sistem feodalisme. Peristiwa tersebut akan dicatat dalam sejarah telah terjadi perang saudara yang mengakibatkan korban jiwa. Kemunculan kaum *Uleebalang* yang mendedikasikan dirinya sebagai penguasa tradisional serta ulama sebagai penguasa dari segi agama memberi ruang perdebatan yang seru. Padahal kedua elemen tersebut saling melengkapi pada masa jayanya kerajaan Aceh. Teuku Muhammad Daud Cumbok merupakan tokoh sentral dari

kalangan *Uleebalang* yang mendedikasikan diri dukungan atas kembalinya Belanda ke Indonesia. Sehingga momentum ini dimanfaatkan untuk mewujudkan sebuah kerangka sistem Feodal. Dua tokoh tersebut satu dari dua golongan politik yang berbeda tersebut.

D. KESIMPULAN

Selama satu tahun antara bulan Desember 1945 hingga dengan bulan Februari 1946 telah terjadi perang saudara yang menelan banyaknya korban Jiwa. Pergerakan menuju revolusi sosial memberi gambaran bahwa sesungguhnya kejadian perang Cumbok meningkatkan kita akan hausnya kekuasaan yang bersistem feodal. Pada kenyataannya seluruh *Uleebalang* dibunuh hingga sampai pada keluarga. Tentunya golongan *Uleebalang* menjadi lemah tanpa adanya perlawanan yang berarti sehingga dalam tatanan sosial *Uleebalang* hingga saat ini tidak lagi mendapatkan peranan penting di Aceh. Kegagalan *Uleebalang* dalam membentuk sistem feodal mengakibatkan kemenangan para ulama yang tergabung dalam PUSA. Hal ini, membuktikan bahwa sistem feodal yang ditawarkan oleh para *Uleebalang* tidak menarik minat kolonial Belanda. Belanda sudah pernah kewalahan pada saat kolonial berdiri tegak di aceh sebelum kemerdekaan. Namun sepanjang tujuh dekade aceh dilanda peperangan dengan Belanda.

Sistem feodal yang ditawarkan tersebut tidak membuat belanda menginjakkan kakinya di bumi serambi mekkah. Sesudah tahun 1945 pemerintah kolonial Belanda lebih

cenderung melakukan aksi militernya di luar Aceh. Ketika belanda berhasil menguasai sebagian besar Sumatera mereka tidak berupaya untuk menembus daerah Aceh. Dan hal tersebut tentunya menjadikan Aceh bisa saja menjadi sebuah negara berdaulat dan merdeka. Namun, pada kenyataannya Aceh kembali kepangkuan ibu pertiwi. Tidak dapat dipungkiri bahwa Aceh merupakan daerah terakhir yang dimasuki oleh setelah itu 69 tahun lamanya perang tiada hentinya. Belanda menganggap bahwa perang Aceh adalah neraka mematikan bagi mereka. Hal ini menjadi pertimbangan bagi belanda utuk tidak kembali lagi ke Aceh untuk melancarkan serangan Agresinya pasca perang saudara di Aceh. Pada dasarnya setelah tahun 1945 merupakan momentum bagi Aceh untuk menentukan nasib sendiri karena setelahnya ada agresi militer tahap satu dan dua yang dilakukan oleh Belanda.

Memang tidak dapat dimaknai ketika perang antar saudara tersebut terjadi antara dua golongan yang kuat secara politik. Eforia kemerdekaan kala itu semakin menggaung kemunculan pada organisasi politik seperti PUSA, API, BPK, dan organisasi kelasykaran lainnya di Aceh. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sesungguhnya para *Uleebalang* banyak yang menjadi pejuang Aceh pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia seperti Teuku Umar, Teuku chik di Tunong, dan pejuang perempuan seperti Tjut Meuthia dengan anaknya Teuku raja Sabi serta Tjut Nyak Dhien. Mereka juga pernah melawan hedonisme dan feodalisme Belanda.

E. REFERENSI

- Alfian, T.Ibrahim etc, 1982, *Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh*, (1945-1949), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh.
- Amin, S.M, 1978, *Kenang-kenangan Dari Masa Lampau*, Jakarta Pradnya Paramita.
- Di Tiro, Hasan Muhammad, 1948, *"Risalah Perang Atjeh 1873-1927"*, Yogyakarta: Pustaka Tiro Yogyakarta,
- Hasan Saleh, 1992, *Mengapa Aceh Bergolak: Bertarung untuk Kepentingan Bangsa dan Bersabung untuk Kepentingan Daerah*, Grafiti, Jakarta.
- M. Nur El Ibrahimy, 2001, *Peranan Tgk. Muhammad Daud Beureu-eh dalam Pergolakan Aceh*, Jakarta, Media Da'wah.
- Nazaruddin Sjamsuddin, 1999 *Revolusi di Serambi Mekah: Kisah Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI Press).
- Reid, Antony, 2005, *Asal Mula Konflik Aceh: dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.